

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Manajemen sarana prasarana pendidikan merupakan kajian teoritis multidimensional yang melintasi berbagai perspektif keilmuan, mencakup aspek administratif, pedagogis, teknologis, dan manajerial. Teori manajemen sarana prasarana berkembang secara dinamis seiring dengan transformasi paradigmatis dalam dunia pendidikan, yang semakin menuntut pendekatan komprehensif dan integratif dalam pengelolaan sumber daya pendidikan (Mulyasa, 2012).

Kerangka teoritis manajemen sarana prasarana pendidikan dapat dipahami melalui pendekatan sistem yang memandang infrastruktur pendidikan sebagai ekosistem kompleks yang saling berinterkoneksi. Setiap komponen sarana prasarana tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk jaringan fungsional yang secara simultan mendukung proses pembelajaran. Pendekatan sistemik ini mendorong pengembangan model manajemen yang holistik, yang memperhatikan interrelasi antara aspek fisik, pedagogis, teknologis, dan manajerial dalam pengelolaan fasilitas pendidikan.

Teori kontemporer dalam manajemen sarana prasarana pendidikan semakin menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas. Hal ini tercermin dalam konsep ruang belajar dinamis yang mampu beradaptasi dengan berbagai model pedagogis, teknologi pembelajaran terkini, dan keberagaman

gaya belajar peserta didik. Ruang belajar tidak lagi dipahami sebagai entitas statis, melainkan sebagai medium transformatif yang secara aktif mendukung proses konstruksi pengetahuan (Barnawi & Arifin, 2012).

Perspektif teoritis modern mengembangkan kerangka konseptual yang memandang manajemen sarana prasarana sebagai sistem berkelanjutan yang meliputi beberapa tahapan kritis. Pertama, tahap perencanaan strategis yang komprehensif, yang tidak sekadar mempertimbangkan kebutuhan saat ini, tetapi juga mengantisipasi kebutuhan masa depan. Kedua, tahap pengadaan yang memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Ketiga, tahap pemeliharaan yang sistematis untuk memastikan keberfungsian optimal sarana prasarana. Keempat, tahap evaluasi berkelanjutan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Teori manajemen sarana prasarana pendidikan kontemporer juga semakin mengintegrasikan perspektif teknologis yang canggih. Konsep smart infrastructure mulai berkembang, yang menggabungkan teknologi informasi, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan fasilitas pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan monitoring real-time, prediksi kebutuhan, dan optimalisasi penggunaan sarana prasarana secara lebih efisien dan cerdas.

Dimensi teoritis manajemen sarana prasarana semakin kompleks dengan munculnya paradigma pendidikan abad 21 yang menuntut fleksibilitas, kolaborasi, dan inovasi. Sarana prasarana tidak lagi dipahami sebagai infrastruktur pasif, melainkan sebagai ekosistem aktif yang mendorong

keaktivitas, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas.

B. Konsep Dasar

1. Konsep Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya organisasi secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen tidak hanya berkaitan dengan pengaturan pekerjaan, tetapi juga mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi seluruh aktivitas organisasi agar berjalan secara terarah.

Menurut George R. Terry (2010), manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pendapat ini menunjukkan bahwa manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan saling berkaitan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya.

Henry Fayol (1949) menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi. Fayol menekankan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan

pemimpin dalam mengelola seluruh komponen organisasi secara terstruktur dan sistematis.

Sementara itu, Stoner (2006) menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat ini menegaskan bahwa manajemen berkaitan erat dengan kerja sama dan koordinasi dalam organisasi.

Menurut Robbins dan Coulter (2012), manajemen merupakan proses mengoordinasikan aktivitas kerja agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa manajemen tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pemimpin dalam mengelola sumber daya manusia.

Dalam konteks pendidikan, manajemen menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan karena pendidikan melibatkan banyak komponen seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, dan pembiayaan pendidikan. Semua komponen tersebut harus dikelola secara profesional agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses pengelolaan organisasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan

secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan rangkaian aktivitas utama yang dilakukan dalam proses pengelolaan organisasi. Fungsi-fungsi tersebut menjadi pedoman dasar dalam menjalankan organisasi agar seluruh kegiatan berjalan secara terarah dan sistematis.

Menurut George R. Terry (2010), fungsi manajemen terdiri atas planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan manajemen di berbagai organisasi, termasuk lembaga pendidikan.

1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan proses menentukan tujuan organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi fungsi awal dalam manajemen karena seluruh kegiatan organisasi berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan.

George R. Terry (2010) menyatakan bahwa planning adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi mengenai masa depan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan membantu organisasi bekerja lebih terarah, sistematis, dan efisien.

Menurut Koontz dan O'Donnell (2005), perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling mendasar karena menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi akan mengalami kesulitan dalam menentukan arah dan prioritas kerja.

Dalam pendidikan, perencanaan mencakup penyusunan program sekolah, pengembangan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, perencanaan sarana prasarana, dan pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan pendidikan yang baik akan membantu meningkatkan mutu pembelajaran dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Pengorganisasian dilakukan untuk menciptakan koordinasi kerja yang baik dan menghindari tumpang tindih pekerjaan.

Menurut Henry Fayol (1949), organizing adalah kegiatan menyusun dan mengatur sumber daya organisasi agar dapat bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian mencakup pembentukan struktur organisasi, pembagian kerja, serta penetapan hubungan kerja antaranggota organisasi.

Sementara itu, Terry (2010) menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan tindakan mengelompokkan aktivitas dan menetapkan hubungan kewenangan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam lembaga pendidikan, pengorganisasian terlihat pada pembagian tugas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan staf lainnya sesuai bidang kerja masing-masing. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan kerja sama yang harmonis dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan.

3) Pelaksanaan/Pengarahan (Actuating)

Pelaksanaan atau pengarahan merupakan proses menggerakkan dan memotivasi anggota organisasi agar melaksanakan tugas sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini sangat berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan hubungan interpersonal.

Menurut George R. Terry (2010), actuating adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran organisasi. Fungsi pelaksanaan sangat penting karena keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengarahkan anggota organisasi.

Koontz dan O'Donnell (2005) menjelaskan bahwa pengarahan mencakup kegiatan memimpin, memberikan motivasi, serta menciptakan komunikasi yang baik agar anggota organisasi bekerja secara efektif.

Dalam dunia pendidikan, fungsi pelaksanaan dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengarahkan guru dan tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan tugas secara profesional. Kepala sekolah juga berperan menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga seluruh anggota organisasi termotivasi meningkatkan mutu pendidikan.

4) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan proses memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan program dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Menurut Robbins dan Coulter (2012), controlling adalah proses memantau aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana serta melakukan tindakan korektif jika diperlukan.

George R. Terry (2010) menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.

Dalam pendidikan, pengawasan dilakukan terhadap proses pembelajaran, kinerja guru, penggunaan sarana prasarana, serta pelaksanaan program sekolah. Pengawasan yang baik akan membantu meningkatkan disiplin kerja, efektivitas program, dan mutu pendidikan.

c. Tujuan Manajemen

Tujuan manajemen pada dasarnya adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal. Efektif berarti tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan efisien berarti tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya secara tepat dan hemat. Dengan adanya manajemen yang baik, organisasi mampu menjalankan seluruh aktivitas secara terarah, sistematis, dan terkoordinasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2017), tujuan manajemen adalah memperoleh hasil yang maksimal melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil akhir, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses pencapaian tujuan dilakukan secara optimal. Sementara itu, George R. Terry (2010) menjelaskan bahwa tujuan manajemen adalah memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan

sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Terry menekankan bahwa manajemen berfungsi sebagai alat pengendali agar aktivitas organisasi tetap berada pada jalur yang benar.

Selain itu, Robbins dan Coulter (2012) menyatakan bahwa tujuan manajemen adalah menciptakan koordinasi kerja yang efektif sehingga organisasi mampu mencapai target yang diinginkan melalui kerja sama yang terorganisasi. Pendapat ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi lainnya. Senada dengan itu, Stoner (2006) menjelaskan bahwa tujuan manajemen adalah meningkatkan produktivitas organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang baik.

Dalam konteks pendidikan, tujuan manajemen tidak hanya terbatas pada pencapaian target administratif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Manajemen pendidikan bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang efektif, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, membangun budaya organisasi yang positif, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi peserta didik. Melalui penerapan manajemen yang baik, sekolah atau madrasah dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai tujuan pendidikan nasional.

Menurut Syaiful Sagala (2013), tujuan manajemen pendidikan adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sehingga seluruh komponen pendidikan dapat bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, Mulyasa (2012) menyatakan bahwa tujuan manajemen pendidikan adalah menciptakan lembaga pendidikan yang produktif, berkualitas, dan mampu memberikan layanan pendidikan secara profesional.

Dalam era pendidikan modern, tujuan manajemen juga berkaitan dengan kemampuan lembaga pendidikan dalam menghadapi perubahan dan tantangan global. Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus mampu menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing lembaga pendidikan, serta mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, manajemen menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan yang berkualitas.

d. Prinsip-Prinsip Manajemen

Prinsip manajemen merupakan pedoman dasar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan organisasi agar berjalan secara efektif, sistematis, dan terarah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi pemimpin dalam mengelola organisasi sehingga seluruh aktivitas dapat dilaksanakan secara teratur dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tokoh yang paling dikenal dalam pengembangan prinsip manajemen adalah Henry Fayol. Menurut Fayol (1949), terdapat 14 prinsip manajemen yang menjadi dasar dalam pengelolaan organisasi modern. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pembagian kerja (*division of work*), wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*), disiplin (*discipline*), kesatuan perintah (*unity of command*), kesatuan arah (*unity of direction*), kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (*subordination of individual interest*), pemberian penghargaan (*remuneration*), sentralisasi (*centralization*), rantai skalar (*scalar chain*), keteraturan (*order*), keadilan (*equity*), stabilitas pegawai (*stability of tenure*), inisiatif (*initiative*), dan semangat kerja sama (*esprit de corps*).

Prinsip pembagian kerja bertujuan meningkatkan efisiensi organisasi karena setiap individu bekerja sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Dengan pembagian kerja yang jelas, pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif. Sementara itu, prinsip wewenang dan tanggung jawab menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kewenangan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diembannya agar mampu menjalankan tugas organisasi secara optimal.

Prinsip disiplin menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib organisasi. Disiplin menjadi faktor penting dalam menciptakan keteraturan kerja dan meningkatkan produktivitas

organisasi. Selain itu, prinsip kesatuan perintah mengandung makna bahwa setiap anggota organisasi sebaiknya menerima instruksi dari satu atasan agar tidak terjadi kebingungan dalam menjalankan tugas.

Fayol juga menekankan pentingnya semangat kerja sama (*esprit de corps*) dalam organisasi. Menurutinya, kerja sama dan solidaritas antaranggota organisasi akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kekuatan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Prinsip ini sangat relevan dalam lembaga pendidikan karena keberhasilan pendidikan memerlukan kerja sama yang baik antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat.

Selain Fayol, prinsip manajemen juga dikembangkan oleh Luther Gulick (1937) melalui konsep POSDCORB yang meliputi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Konsep tersebut menekankan bahwa manajemen harus dilakukan secara sistematis dan mencakup seluruh aspek pengelolaan organisasi.

Dalam lembaga pendidikan, prinsip-prinsip manajemen sangat penting untuk menciptakan tata kelola sekolah yang profesional, tertib, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam mengelola kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta hubungan sekolah dengan masyarakat agar seluruh kegiatan pendidikan berjalan secara efektif.

Penerapan prinsip manajemen yang baik juga membantu lembaga pendidikan menciptakan budaya organisasi yang disiplin, transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Dengan demikian, organisasi pendidikan akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

e. Manajemen dalam Perspektif Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, pembiayaan, administrasi, serta hubungan sekolah dengan masyarakat.

Menurut Syaiful Sagala (2013), manajemen pendidikan adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya pendidikan melalui kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pendapat ini menunjukkan bahwa pendidikan memerlukan pengelolaan yang sistematis agar seluruh komponen pendidikan dapat bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Mulyasa (2012) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan seluruh komponen pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dalam pandangan tersebut, manajemen pendidikan tidak hanya berkaitan dengan administrasi sekolah, tetapi

juga mencakup upaya peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Nanang Fattah (2013) menyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari penataan sumber daya pendidikan secara sistematis untuk menciptakan proses pendidikan yang bermutu. Menurutnya, keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola seluruh sumber daya secara profesional dan berorientasi pada mutu.

Dalam perspektif pendidikan modern, manajemen memiliki peran yang sangat strategis karena lembaga pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Oleh karena itu, manajemen pendidikan harus mampu menciptakan inovasi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta mengembangkan sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Menurut Engkoswara dan Komariah (2011), manajemen pendidikan bertujuan menciptakan kondisi pendidikan yang efektif melalui pengelolaan seluruh komponen pendidikan secara terpadu. Pendapat tersebut menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar seluruh unsur pendidikan agar proses pembelajaran berjalan secara optimal.

Dalam praktiknya, kepala sekolah atau kepala madrasah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan manajemen pendidikan.

Kepala sekolah bertanggung jawab merencanakan program pendidikan, mengorganisasi tenaga pendidik, mengarahkan pelaksanaan pembelajaran, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Keberhasilan lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam menerapkan fungsi dan prinsip manajemen secara profesional.

Selain itu, manajemen pendidikan juga berperan dalam menciptakan budaya organisasi yang positif, meningkatkan profesionalisme guru, memperkuat hubungan sekolah dengan masyarakat, serta membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Dengan penerapan manajemen yang baik, lembaga pendidikan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu bersaing di era global

2. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

a. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan segala perlengkapan, alat, media, dan bahan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan. Sarana pendidikan meliputi meja, kursi, papan tulis, buku, laboratorium, media pembelajaran, komputer, proyektor, dan berbagai alat bantu pembelajaran lainnya.

Menurut Ibrahim Bafadal (2014), sarana pendidikan adalah seluruh perangkat peralatan, bahan, dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sarana memiliki hubungan langsung dengan kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, prasarana pendidikan merupakan fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan. Prasarana mencakup gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, jalan menuju sekolah, jaringan listrik, tempat ibadah, serta fasilitas penunjang lainnya.

Mulyasa (2012) menjelaskan bahwa prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sekolah secara efektif. Dengan demikian, sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas.

Dalam konteks pendidikan modern, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, kenyamanan belajar peserta didik, serta profesionalisme guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

b. Perbedaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki hubungan yang erat, namun keduanya memiliki perbedaan dalam fungsi dan penggunaannya. Sarana merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses

pembelajaran, sedangkan prasarana merupakan fasilitas pendukung yang membantu terselenggaranya proses pendidikan.

Menurut Bafadal (2014), sarana pendidikan bersifat langsung digunakan dalam pembelajaran seperti buku, media pembelajaran, komputer, dan alat laboratorium, sedangkan prasarana bersifat tidak langsung seperti gedung sekolah, halaman, ruang kelas, dan jaringan utilitas sekolah.

Perbedaan lainnya terletak pada fungsi operasionalnya. Sarana lebih berkaitan dengan aktivitas akademik dan pembelajaran, sedangkan prasarana lebih berkaitan dengan penyediaan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif.

Meskipun berbeda, sarana dan prasarana saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Tanpa sarana yang memadai, proses pembelajaran akan kurang efektif, sedangkan tanpa prasarana yang baik, kegiatan pendidikan akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

c. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana bertujuan mengelola seluruh fasilitas pendidikan agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung proses pembelajaran.

Menurut Mulyasa (2012), tujuan manajemen sarana dan prasarana adalah menciptakan kondisi sekolah yang mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran secara optimal. Manajemen sarana dan

prasarana juga bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memperpanjang usia pakai fasilitas pendidikan, serta mencegah terjadinya kerusakan dan pemborosan.

Bafadal (2014) menyatakan bahwa tujuan pengelolaan sarana dan prasarana adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai kebutuhan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks madrasah, tujuan manajemen sarana dan prasarana tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, bersih, aman, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik.

d. Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana

Fungsi manajemen sarana dan prasarana adalah mengatur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas pendidikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Barnawi dan M. Arifin (2012), fungsi manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, pengawasan, dan penghapusan fasilitas pendidikan.

Fungsi tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh fasilitas pendidikan tersedia sesuai kebutuhan, digunakan secara tepat, dirawat dengan baik, serta diawasi agar tetap dalam kondisi layak pakai.

Dalam pendidikan, fungsi manajemen sarana dan prasarana sangat penting karena fasilitas yang memadai akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, kenyamanan belajar peserta didik, dan efektivitas kerja guru.

e. Prinsip-Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana

Prinsip manajemen sarana dan prasarana merupakan pedoman dasar dalam pengelolaan fasilitas pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

Menurut Bafadal (2014), prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana meliputi prinsip efisiensi, efektivitas, administrasi, tanggung jawab, transparansi, dan keberlanjutan.

Prinsip efisiensi menekankan penggunaan fasilitas secara hemat dan tepat guna. Prinsip efektivitas berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas sesuai tujuan pendidikan. Prinsip administrasi menuntut adanya pencatatan dan pengelolaan data fasilitas secara sistematis.

Selain itu, prinsip tanggung jawab menunjukkan bahwa seluruh warga sekolah memiliki kewajiban menjaga fasilitas pendidikan. Prinsip transparansi diperlukan agar pengelolaan fasilitas dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut membantu sekolah dan madrasah menciptakan pengelolaan fasilitas pendidikan yang profesional dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

f. Ruang Lingkup Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

1) Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan merupakan proses menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah. Perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan pembelajaran, jumlah peserta didik, kondisi fasilitas, dan kemampuan anggaran sekolah.

Menurut Barnawi dan Arifin (2012), perencanaan yang baik akan membantu sekolah menyediakan fasilitas sesuai prioritas kebutuhan pendidikan.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan merupakan kegiatan menyediakan fasilitas pendidikan melalui pembelian, bantuan pemerintah, hibah, atau kerja sama dengan pihak lain.

Menurut Mulyasa (2012), pengadaan sarana prasarana harus memperhatikan kualitas, kebutuhan, dan efisiensi penggunaan anggaran.

3) Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan seluruh fasilitas pendidikan secara sistematis. Inventarisasi bertujuan mempermudah pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan fasilitas sekolah.

Bafadal (2014) menjelaskan bahwa inventarisasi sangat penting untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan status kepemilikan fasilitas pendidikan.

4) Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pendidikan secara optimal. Pemanfaatan fasilitas harus dilakukan secara tepat guna dan sesuai kebutuhan pembelajaran.

Dalam pendidikan modern, pemanfaatan teknologi seperti komputer, internet, dan media digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

5) Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan menjaga dan merawat fasilitas pendidikan agar tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan.

Menurut Barnawi dan Arifin (2012), pemeliharaan dilakukan melalui perawatan rutin, perbaikan ringan, dan pengawasan penggunaan fasilitas. Pemeliharaan yang baik akan memperpanjang usia pakai sarana dan prasarana.

6) Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pengelolaan sarana dan prasarana berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Terry (2010), pengawasan bertujuan menghindari penyimpangan serta memastikan fasilitas pendidikan digunakan secara efektif.

7) Penghapusan

Penghapusan merupakan kegiatan mengeluarkan fasilitas yang sudah rusak atau tidak layak pakai dari daftar inventaris sekolah.

Penghapusan dilakukan agar pengelolaan fasilitas lebih efektif dan tidak membebani administrasi sekolah.

g. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan ketentuan minimal mengenai fasilitas pendidikan yang harus dimiliki sekolah atau madrasah.

Pemerintah Indonesia menetapkan standar sarana dan prasarana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.

Standar tersebut mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, ruang guru, fasilitas olahraga, media pembelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya.

Standar sarana dan prasarana bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung efektivitas pembelajaran.

h. Kebijakan Pemerintah tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang memadai.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan peserta didik.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai program bantuan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, dan pengembangan laboratorium sekolah.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

i. Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Perspektif Pendidikan Islam/Madrasah

Dalam perspektif pendidikan Islam, pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab, kebersihan, keteraturan, dan kemaslahatan.

Menurut Muhaimin (2012), pendidikan Islam menempatkan fasilitas pendidikan sebagai sarana untuk mendukung pembentukan

akhlak, ilmu pengetahuan, dan ibadah peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara amanah dan profesional.

Dalam madrasah, sarana dan prasarana tidak hanya berupa ruang belajar, tetapi juga fasilitas keagamaan seperti masjid, ruang tahfiz, dan sarana pembelajaran Islam lainnya.

Manajemen sarana dan prasarana di madrasah harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang religius, nyaman, bersih, dan mendukung pembentukan karakter Islami peserta didik.

3. Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Madrasah

a. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau rencana yang telah disusun sebelumnya.

Menurut George C. Edward III (1980), implementasi adalah tahap pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pendidikan, implementasi manajemen sarana dan prasarana berarti pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan fasilitas pendidikan agar mendukung proses pembelajaran secara optimal.

b. Proses Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana

Implementasi manajemen sarana dan prasarana dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi fasilitas pendidikan.

Menurut Mulyasa (2012), implementasi yang baik memerlukan koordinasi, kepemimpinan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah. Dalam madrasah, implementasi pengelolaan fasilitas harus dilakukan secara sistematis agar seluruh sarana prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

c. Strategi Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana

Strategi implementasi dilakukan melalui perencanaan kebutuhan, pengelolaan anggaran, pemanfaatan teknologi, pelibatan masyarakat, dan pengawasan penggunaan fasilitas. Menurut Sagala (2013), strategi pengelolaan fasilitas pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan.

4. Mutu Pembelajaran

a. Pengertian Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran merupakan tingkat kualitas proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif.

Menurut Deming (1986), mutu adalah tingkat kesesuaian hasil dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam pendidikan, mutu pembelajaran berkaitan dengan kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik.

b. Konsep Mutu dalam Pendidikan

Konsep mutu pendidikan berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Sallis (2012) menjelaskan bahwa mutu pendidikan mencakup kepuasan peserta didik, profesionalisme guru, efektivitas pembelajaran, dan kualitas layanan pendidikan.

c. Indikator Mutu Pembelajaran

Indikator mutu pembelajaran meliputi kualitas guru, efektivitas metode pembelajaran, hasil belajar peserta didik, lingkungan belajar, dan penggunaan media pembelajaran.

Menurut Hamalik (2011), pembelajaran bermutu ditandai dengan keterlibatan aktif peserta didik dan tercapainya tujuan pembelajaran.

5. Hubungan Manajemen Sarana dan Prasarana dengan Mutu Pembelajaran

a. Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Proses Pembelajaran

Sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas proses pembelajaran. Fasilitas yang lengkap dan memadai membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan mudah dipahami peserta didik.

Menurut Mulyasa (2012), kualitas sarana prasarana berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik.

b. Efektivitas Penggunaan Sarana Pembelajaran

Efektivitas penggunaan sarana pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru memanfaatkan media dan fasilitas pendidikan secara

optimal. Media pembelajaran yang digunakan secara tepat akan meningkatkan perhatian, minat, dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.

c. Pemanfaatan Teknologi dan Media Pembelajaran

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi pendidikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Penggunaan komputer, internet, papan interaktif, dan media digital membantu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif.

d. Lingkungan Belajar yang Kondusif

Lingkungan belajar yang nyaman, aman, bersih, dan tertata baik akan meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar peserta didik. Prasarana pendidikan yang baik membantu menciptakan suasana belajar yang mendukung keberhasilan pembelajaran.

e. Kontribusi Manajemen Sarana dan Prasarana terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran

Manajemen sarana dan prasarana yang baik memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Pengelolaan fasilitas yang efektif membantu sekolah menyediakan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas, inovasi, dan efektivitas pembelajaran.

Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas guru, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara profesional.

6. Landasan Enam Sistem Nilai

Landasan enam sistem nilai merupakan kerangka nilai fundamental yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah (Muhaimin, 2012). Keenam sistem nilai tersebut mencakup dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, dan ilmu pengetahuan yang saling melengkapi dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

Dalam konteks manajemen sarana dan prasarana pendidikan, keenam sistem nilai ini menjadi pedoman bagi kepala madrasah, pendidik, dan seluruh warga madrasah dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan fasilitas pendidikan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

a. Nilai Ketuhanan (Theological Value)

Nilai ketuhanan merupakan landasan spiritual yang paling mendasar dalam sistem pendidikan Islam. Dalam konteks manajemen sarana dan prasarana pendidikan, nilai ketuhanan mengandung makna bahwa seluruh fasilitas pendidikan merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keikhlasan (Muhaimin, 2012). Pengelolaan sarana dan prasarana yang dilandasi nilai ketuhanan akan menghasilkan sikap amanah dalam penggunaan anggaran, transparansi dalam pengadaan fasilitas, serta kepedulian terhadap kelestarian fasilitas pendidikan.

Firman Allah Swt. dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Prinsip amanah ini menjadi landasan moral bagi pengelola pendidikan dalam menjalankan fungsi manajemen sarana dan prasarana secara jujur dan bertanggung jawab (Muhaimin, 2012). Dengan demikian, setiap keputusan dalam pengelolaan fasilitas pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

b. Nilai Kemanusiaan (Humanitarian Value)

Nilai kemanusiaan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan menekankan pentingnya menempatkan kepentingan peserta didik sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan pengelolaan fasilitas (Fattah, 2013). Sarana dan prasarana pendidikan harus dikelola dengan memperhatikan kebutuhan, kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.

Nilai kemanusiaan juga tercermin dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah anak, dan mendukung perkembangan potensi setiap peserta didik secara optimal. Pengelolaan sarana dan prasarana yang berperspektif kemanusiaan akan mendorong terciptanya fasilitas yang adaptif terhadap kebutuhan khusus peserta didik, sehingga seluruh peserta didik dapat menikmati layanan pendidikan yang setara dan berkualitas (Sallis, 2012).

c. Nilai Persatuan (Unity Value)

Nilai persatuan dalam konteks manajemen sarana dan prasarana pendidikan menekankan pentingnya kerja sama, koordinasi, dan keterpaduan antara seluruh komponen sekolah dalam mengelola fasilitas pendidikan (Sagala, 2013). Pengelolaan yang baik memerlukan sinergi antara kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam mewujudkan fasilitas pendidikan yang optimal.

Nilai persatuan juga mendorong terciptanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap seluruh fasilitas madrasah. Ketika seluruh warga madrasah merasa bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penggunaan sarana prasarana, maka fasilitas pendidikan akan terjaga dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen partisipatif yang menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Terry, 2010).

d. Nilai Kerakyatan (Democratic Value)

Nilai kerakyatan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan mencerminkan prinsip demokratisasi pendidikan yang menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengadaan, dan pengawasan fasilitas pendidikan (Robbins & Coulter, 2012). Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif warga madrasah.

Dalam praktiknya, nilai kerakyatan diwujudkan melalui mekanisme musyawarah dalam perencanaan kebutuhan sarana prasarana, keterlibatan komite madrasah dalam pengawasan penggunaan anggaran, serta pemberian akses informasi yang terbuka kepada seluruh stakeholder tentang kondisi dan pengelolaan fasilitas madrasah (Mulyasa, 2018). Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana yang demokratis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

e. Nilai Keadilan (Justice Value)

Nilai keadilan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik (Fattah, 2013). Keadilan dalam pengelolaan fasilitas berarti bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana pendidikan yang tersedia.

Nilai keadilan juga tercermin dalam distribusi fasilitas yang merata, penganggaran yang proporsional sesuai kebutuhan, serta pemeliharaan yang konsisten agar seluruh ruang dan fasilitas dapat digunakan secara optimal (Sagala, 2013). Dalam konteks madrasah, nilai keadilan mendorong kepala madrasah untuk memastikan bahwa setiap kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya mendapatkan perhatian dan perawatan yang setara.

f. Nilai Ilmu Pengetahuan (Scientific Value)

Nilai ilmu pengetahuan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan menekankan pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan inovatif dalam pengelolaan fasilitas pendidikan (Sallis, 2012). Manajemen sarana dan prasarana yang dilandasi nilai ilmu pengetahuan akan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam inventarisasi, pemanfaatan analisis kebutuhan berbasis data dalam perencanaan, serta penerapan inovasi dalam pengembangan fasilitas pembelajaran.

Nilai ilmu pengetahuan juga mendorong lembaga pendidikan untuk terus mengembangkan fasilitas yang mendukung pembelajaran berbasis riset, eksperimen, dan inovasi. Keberadaan laboratorium, perpustakaan digital, pusat sumber belajar, dan fasilitas teknologi merupakan wujud nyata dari implementasi nilai ilmu pengetahuan dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan (Barnawi & Arifin, 2012). Dengan demikian, fasilitas pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai ekosistem pembelajaran yang mendorong pengembangan budaya ilmiah di madrasah.

Keenam sistem nilai tersebut saling berkaitan dan membentuk landasan yang komprehensif dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di madrasah. Implementasi keenam nilai ini secara terpadu akan menghasilkan pengelolaan fasilitas yang profesional, berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan (Muhaimin, 2012).

7. Landasan Kebijakan

a. Pengertian Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan merupakan dasar hukum, peraturan, dan ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks manajemen sarana dan prasarana pendidikan, landasan kebijakan berfungsi sebagai acuan bagi lembaga pendidikan dalam merencanakan, mengelola, memanfaatkan, serta mengembangkan fasilitas pendidikan secara efektif dan sesuai standar nasional pendidikan.

Kebijakan pendidikan sangat penting karena menjadi pedoman dalam menciptakan sistem pendidikan yang terarah, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Melalui kebijakan yang jelas, pengelolaan sarana dan prasarana di madrasah dapat dilakukan secara sistematis, transparan, dan bertanggung jawab.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Pada Pasal 45 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya menjadi dasar dalam penetapan standar mutu pendidikan nasional. Salah satu standar yang diatur adalah standar sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Sarana pendidikan meliputi peralatan pembelajaran, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, sedangkan prasarana meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, dan fasilitas penunjang lainnya.

Standar sarana dan prasarana bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah maupun madrasah.

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar, sekolah menengah, dan madrasah. Peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai jenis, jumlah, kualitas, dan kelayakan sarana serta prasarana yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan.

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi sekolah dan madrasah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai standar nasional. Dengan adanya standar tersebut, lembaga pendidikan diharapkan mampu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung efektivitas pembelajaran.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi dasar dalam proses evaluasi dan akreditasi sekolah terkait kelayakan sarana dan prasarana pendidikan.

e. Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Madrasah

Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah juga memiliki landasan kebijakan yang diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan madrasah, peningkatan mutu pendidikan Islam, serta pengembangan sarana dan prasarana madrasah.

Peraturan Menteri Agama menegaskan bahwa madrasah harus memiliki fasilitas pendidikan yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Pengelolaan sarana dan prasarana madrasah juga harus dilakukan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam.

Kebijakan tersebut memberikan arah bagi kepala madrasah dalam melaksanakan fungsi manajemen sarana dan prasarana secara profesional.

f. Kebijakan tentang Mutu Pembelajaran

Peningkatan mutu pembelajaran menjadi fokus utama berbagai kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah mendorong setiap satuan pendidikan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai.

Kebijakan Merdeka Belajar misalnya, menekankan pentingnya pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta memanfaatkan teknologi pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan modern.

Dengan adanya landasan kebijakan tersebut, lembaga pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

C. Penelitian Terdahulu Terkait

1. Penelitian tentang Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penelitian mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian dilakukan oleh Mulyasa (2018) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan secara optimal.

Penelitian lain dilakukan oleh Suryosubroto (2019) yang menemukan bahwa ketersediaan sarana pembelajaran memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar peserta didik dan kinerja guru. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap cenderung mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif.

2. Penelitian tentang Mutu Pembelajaran di Madrasah

Penelitian mengenai mutu pembelajaran di madrasah menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin (2020) menjelaskan bahwa madrasah yang memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan fasilitas pembelajaran yang memadai mampu meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar peserta didik.

Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas pendidikan yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas pembelajaran di madrasah.

3. Penelitian tentang Implementasi Manajemen Pendidikan

Penelitian terkait implementasi manajemen pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen organisasi sekolah. Implementasi manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program secara sistematis.

Penelitian oleh Nanang Fattah (2021) menunjukkan bahwa implementasi manajemen pendidikan yang efektif dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan dan memperkuat budaya organisasi sekolah.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan memerlukan dukungan sumber daya manusia, fasilitas pendidikan, serta kepemimpinan yang profesional.

4. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, terdapat persamaan dalam pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung mutu pembelajaran. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang memadai memiliki kontribusi positif terhadap efektivitas pembelajaran dan kualitas pendidikan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena lebih menekankan pada implementasi manajemen sarana dan prasarana secara menyeluruh dalam konteks madrasah. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah.

5. Posisi dan Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan madrasah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketersediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga menelaah bagaimana pengelolaan fasilitas tersebut dilaksanakan secara efektif untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam pengelolaan sarana dan prasarana madrasah yang relevan dengan kebutuhan pendidikan modern.